



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LIMA PULUH KOTA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI (MTsN) 5 LIMA PULUH KOTA
Jl. Khatib Sulaiman Situjuh Batur Kec Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota
Telp. (0752) 774037 Kode POS. 26252 e-mail. mtsni7batur@gmail.com

K
Jl.
Ko

Situjuh Batur, 17 Januari 2025

Kepada

Yth. Kepala KPPN Bukittinggi

di

Bukittinggi

SURAT PENGANTAR

Nomor : 060/MTs.03.7.5/KU.00.1/02/2025

No	Isi Surat	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024	1 (satu) eksemplar	Dengan hormat, Bersama ini kami kirimkan Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024 Demikianlah disampaikan, untuk dapat ditindak lanjuti.

Diterima Tanggal :
Diterima Oleh :

Kepala Madrasah

Afifah Nurul Fadhlillah
NIP. 200008112022012001



Silvia Marlina, S.Pd, M.Pd
NIP. 197307272005012003

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

MTsN 5 Lima Puluh Kota adalah entitas akuntansi dari Kementerian Agama yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan MTsN 5 Lima Puluh Kota mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas PMK nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp.0,-** atau 0% persen dari yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar **Rp.790.787.907,-** atau 99.26% persen dari yang dianggarkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2025;
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2025. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar **Rp.2.780.831.563,00** dan Kewajiban sebesar **Rp. 0,00** sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) MTsN 5 Lima Puluh Kota per Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp. Rp. 2.780.831.563,00**
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.



Situjuh Batur, 31 Desember 2025

Pada Pengguna Anggaran,

Silvia Marlina, S.Pd, M.Pd
NIP 197307272005012003

	Halaman
Kata Pengantar	2
Pernyataan Tanggung Jawab	5
I. Ringkasan	7
II. Laporan Realisasi Anggaran	9
III. Neraca	10
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
A.1. Dasar Hukum	12
A.2. Kebijakan Teknis MTsN 5 Lima Puluh Kota	12
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	15
A.4. Kebijakan Akuntansi	15
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	20
B.2. Belanja Negara	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
C.1. Aset Lancar	25
C.2. Aset Tetap	29
C.3. Piutang Jangka Panjang	34
C.4. Aset Lainnya	36
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	37
C.6. Ekuitas Dana Lancar	39
C.7. Ekuitas Dana investasi	39
D. Pengungkapan Penting Lainnya	40
D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	40
D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	40
D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua	40
D.4. Rekening Pemerintah	40
D.5. Pengungkapan Lain-lain	40
Laporan-laporan Pendukung sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012	41
• LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	42
• LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	43
• Neraca Percobaan	44
Laporan Barang Pengguna	45
• Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2025 (intra, ekstra, gabungan) per kelompok	46
• Laporan Barang Persediaan dan BA Stock Opname Fisik	47
• Berita Acara Rekonsiliasi KPKNL	48
Lampiran Lainnya Pendukung CALK	49
• Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua	50
• LPJ Bendahara dan Rekening Koran	51
• Persekot Gaji	52
• Piutang PNB	53
• Berita Acara Rekonsiliasi KPPN	54
• Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAKPA – SIMAK BMN	55



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Laporan Keuangan Satker MTsN 5 Lima Puluh Kota yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Situjuh Batur, 31 Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,


Silvia Marlina, S.Pd, M.Pd
NIP 197307272005012003



Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK nomor 171/PMK.05/2007, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Satker MTsN 5 Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berjalan dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp.0,00** atau mencapai 0,00% persen dari anggaran serta Penerimaan Hibah sebesar Rp.0,00 atau mencapai 0,00 persen dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp.790.787.907,00** atau mencapai 99,26% persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut seluruhnya terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran periode 31 Desember Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dapat disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember Tahun Anggaran 2025 dan 31 Desember TA 2024

Realisasi Anggaran	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2025	% Realisasi Terhadap Anggaran	Realisasi 31 Desember 2024
Pendapatan Negara dan Hibah	0	0	0,00%	0
Belanja Negara	796.697.000	790.787.907	99,26%	785.289.067

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset adalah sebesar **Rp. 2.780.831.563,00** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.964.500, 00 Aset Tetap sebesar **Rp. 2.779.732.063,00**, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp.0,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp.135.000,00

Jumlah Kewajiban adalah sebesar **Rp.0,00** yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar **Rp. 2.780.831.563,00** yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 964.500,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar **Rp.2.779.732.063,00**

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat disajikan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025/31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Rp.	%
Aset	0	0	0,00%	0
Aset lancar	964.500	2.620.750	-	1.656.250
Kas dibendahara pengeluaran	0	0	-	-
Aset Tetap	2.779.732.063	2.869.139.849	-	89.407.786
akumulasi penyusutan	-1.426.759.655	-1.233.661.869	-	193.097.786
Aset lain-lainnya	3.811.900	3.811.900	-	-
Akumulasi penyusutan/ Amortisasi aset tetap lainnya	-3.676.900	-3.614.902	-	61.998
Jumlah Aset lainnya	135.000	196.998	-	61.998
Kewajiban	0	0	20.000.000	
kewajiban jangka pendek	0	0	20.000.000	
utang pada pihak ketiga	0	0	-	
uang muka dari KPPN	20.000.000	0	20.000.000	
Utang jangka pendek lainnya	0	0	-	
Ekuitas Dana	2.780.831.563	2.871.957.597	-91.126.034	
Ekuitas	2.780.831.563	2.871.957.597	-	91.126.034
Jumlah Ekuitas	2.780.831.563	2.871.957.597	-	91.126.034
Ekuitas Dana Investasi				
Jumlah kewajiban dan ekuitas	2.780.831.563	3.010.928.387	91.126.034	

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.



II LAPORAN REALISASI ANGGARAN



III NERACA

IV
CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 133/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS MTsN 5 Lima Puluh Kota

RENSTRA

Rencana Strategis (Renstra) merupakan sub sistem dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta Program dari suatu organisasi yang ditetapkan untuk jangka waktu 1-5 tahun yang akan menjadi arah dan pedoman bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

VISI

Penetapan visi dan misi MTsN 5 Lima Puluh kota merupakan turunan dari penetapan visi dan misi Kementerian Agama sehingga terjalin kesinambungan visi dan misi Kantor Pusat dengan Kantor Instansi Vertikal.

Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi good governance (kepemerintahan yang baik) maka MTsN 5 Lima puluh kota mempunyai visi “Unggul dalam prestasi, terampil, berakhlakul karimah yang berwawasan lingkungan”

Visi ini menjelaskan mengenai kemauan dari semua pegawai dan Guru MTsN 5 Lima Puluh Kota untuk menjadi pengelola perbendaharaan yang berdedikasi, bermoral, transparan dan mempunyai kemampuan teknis dan manajerial.

Untuk mencapai visi tersebut diatas, MTsN 5 Lima Puluh kota menindak lanjuti dengan misi sebagai berikut :

MISI

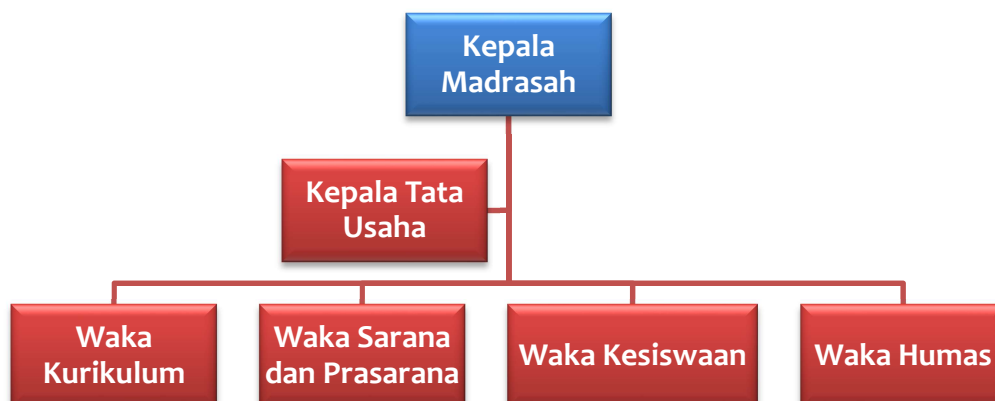
- ✓ Meningkatkan profesionalisme guru dengan mengadakan pendidikan dan latihan, penatarandan forum MGMP serta membudayakan pemamfaatan sumber belajar yang optimal.
- ✓ Melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap peserta didik berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki
- ✓ Membina hubungan kerjasama yang baik dengan orang tua peserta didik, warga masyarakat, pemerintah dan menciptakan iklim madrasah yang kondusif
- ✓ Memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana penunjang kreatifitas/keterampilan peserta didik dalam mengaktualisasikan potensi dirinya
- ✓ Membina dan menyalirkan potensi peserta didik secara optimal
- ✓ Menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia
- ✓ Menumbuh Kembangkan nilai-nilai akhlakul karimah dilingkangan madrasah
- ✓ Memujudkan madrasah dan menciptakan lingkungan bersih, indah, tertib aman dan nyaman.

Untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara strategik MTsN 5 Lima Puluh Kota merupakan satuan pendidikan dasar Sembilan tahun, mempunyai tujuan Pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Tujuan pendidikan MTs Negeri 5 Lima Puluh Kota dalah merupakan jabaran dari visi dan misi Madrasah agar komunikatif dan bias diukur sbb:

- Unggul dalam kegiatan keagamaan (Iman dan taqwa) serta kepedulian terhadap madrasah.
- Unggul dalam perolehan nilai Ujian Nasional dan Ujian Akhir Madrasah
- Unggul dalam persaingan masuk ke jenjang pendidikan lebih lanjut yang bermutu.
- Unggul dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama bidang sains dan matematika yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman
- Unggul dalam lomba olahraga, kesenian, PMR, paskibra dan pramuka.
- Dapat berbahasa asing terutama bahasa arab dan bahasa inggris.

Untuk menjalankan tugas tersebut, MTsN 5 Lima Puluh Kota memiliki struktur sebagai berikut:



MTsN 5 Lima puluh Kota memiliki sumber daya manusia sebagai berikut:

Tabel 3. Sumber Daya Manusia

a. berdasarkan pangkat/golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	PPPK	PPT	
1	Kepala Madrasah	1	-	-	-	1
2	Tata Usaha	-	3	8	2	13
3	Waka Kurikulum	1	-	-	-	1
4	Waka Sarana n Prasarana	-	1	-	-	1
5	Waka kesiswaan	1	-	-	-	1
6	Waka Humas	-	1	-	-	1
7	Guru	7	22	-	-	29
	Jumlah	10	27	8	2	46

b. berdasarkan Pendidikan Formal

No	Unit Kerja	S2	S1/D4	Dipl. III	SLTA	SLTP	Jumlah
1	Kepala Madrasah	1	-	-	-	-	1
2	Tata Usaha	-	3	1	7	2	13
3	Waka Kurikulum	-	1	-	-	-	1
4	Waka Sarana n Prasarana	-	1	-	-	-	1
5	Waka kesiswaan	-	1	-	-	-	1
6	Waka Humas	-	1	-	-	-	1
7	Guru PNS	-	20	-	-	-	29
8	Guru PPPK	-	8	-	-	-	-
	Jumlah	1	38	1	8	2	46

Jumlah pegawai seluruhnya adalah 47 pegawai yang terdiri dari 1 orang Kepala Madrasah, 1 Kepala tata usaha. 1 waka kurikulum, 1 waka sarana dan prasarana, 1 orang waka kesiswaan, 1 waka humas, 27 orang guru PNS dan PPPK, dan 13 orang pegawai tata usaha

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan penyusunan LK

Laporan Keuangan MTsN 5 Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi MTsN 5 Lima Puluh Kota.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu Aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yang terdiri dari Menu Persediaan, Aset Tetap, GL dan pelaporan yang dituangkan SHR (Surat Hasil Rekonsiliasi) Di Aplikasi MON SAKTI yang merupakan Aplikasi berbasis web yang digunakan dalam pelaksanaan Monitoring, rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan

MON SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan perubahan Ekuitas
5. Neraca percobaan (berbasis kas dan Akrua)

Data yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui Aplikasi SAKTI

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian LK Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKML telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan MTsN 5 Lima Puluh Kota adalah:

(1) Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

(2) Belanja

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas bendahara pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas bendahara pengeluaran. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran tersebut disahkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Lima Puluh Kota. Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

(3) Aset

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi

Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruskan pinjaman melalui *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.
- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

c. Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 31 Desember 2025 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2025 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (Satu Juta rupiah), dan
- (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

(4) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/20110 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, MTsN 5 Lima Puluh Kota sudah menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan asset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) dan Asset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2025 untuk asset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2025. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2025, nilai yang

disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor :59/KMK.06/2014 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LRA

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp.0,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp.0,00** atau mencapai 0,00% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah MTsN 5 Lima Puluh Kota adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4
Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan dari Pengelolaan BMN	Rp -	Rp -	0,00%
2	Pendapatan Jasa	Rp -	-	0,00%
3	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	Rp -	Rp -	0,00%
4	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil	Rp -	Rp -	0,00%
5	Pendapatan Iuran dan Denda	Rp -	Rp -	0,00%
6	Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp -	Rp -	0,00%
TOTAL		Rp -	Rp -	0,00%

Sedangkan perbandingan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5
Perbandingan Realisasi PNBPN Tahun Anggaran 2025/Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA 2025	TA 2024	Rp	%
1	Pendapatan dari Pengelolaan BMN	Rp -	Rp -	Rp -	0,00
2	Pendapatan Jasa	Rp -	Rp -	Rp -	0,00
3	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	Rp -	Rp -	Rp -	0,00
4	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	Rp -	Rp -	Rp -	0,00
5	Pendapatan Iuran dan Denda	Rp -	Rp -	Rp -	0,00
6	Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	0,00
TOTAL		Rp -	Rp -	Rp -	0,00

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja
Negara
Rp.790.787.907,00

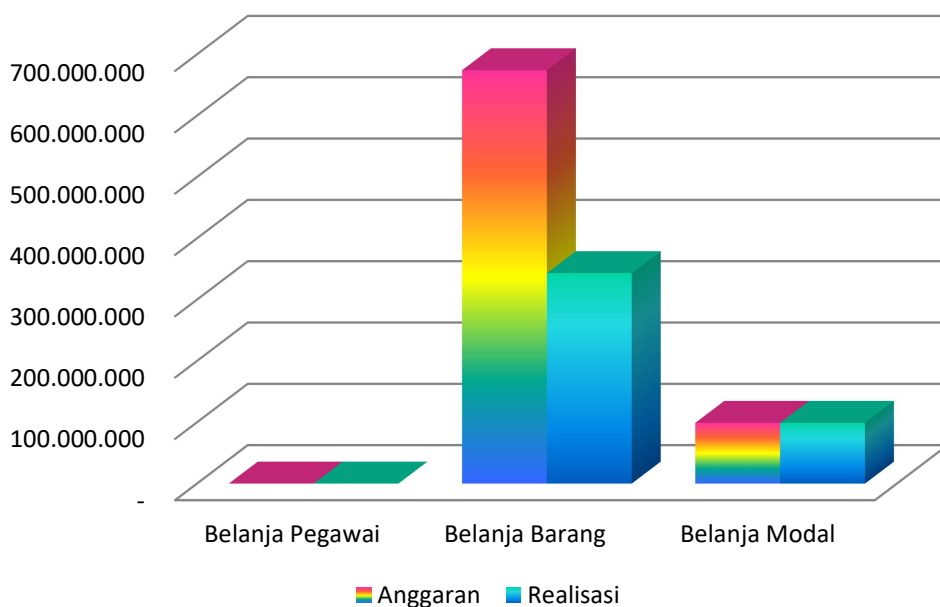
Realisasi belanja pada 31 Desember Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.790.787.907,00 atau sebesar 99.26 % persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025

Kode Jns	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	0	0	#DIV/o!
52	Belanja Barang	693.007.000	687.097.907	99,15%
53	Belanja Modal	103.690.000	103.690.000	100,00%
57	Belanja Bantuan Sosial	0	0	#DIV/o!
Total		796.697.000	790.787.907	99,26%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025



Sedangkan perbandingan realisasi belanja 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dan 30 Juni Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Tabel 7
Perbandingan realisasi Belanja 31 Desember 2025/31 Desember Tahun Anggaran 2023

Kode Jns Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan / (Penurunan)	
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Rp	%
51	Belanja Pegawai	0	0	0	#DIV/o!
52	Belanja Barang	676.039.067	674.087.000	1.952.067	0,29%
53	Belanja Modal	109.250.000	99.050.000	10.200.000	10,30%
57	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	#DIV/o!
Jumlah		785.289.067	773.137.000	12.152.067	1,57%

Realisasi belanja 31 Desember Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.952.067 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain:

- ✦ Penurunan Belanja Pegawai secara umum disebabkan karena gaji pegawai diambil ahli oleh Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota
- ✦ Kenaikan Belanja Barang secara umum disebabkan karena kenaikan Standar Biaya Umum (SBU) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012;
- ✦ kenaikan Belanja Modal secara umum disebabkan karena kenaikan kebutuhan

B.2.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp.0,00

Realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.0,00** atau sebesar 0% persen dari pagu anggaran sebesar Rp.0,00 Apabila dibandingkan antara 31 Desember Tahun Anggaran 2025 dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja pegawai mengalami penurunan sebesar .(0,00),- atau sebesar 100% persen.

Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah seperti pada tabel 8 berikut :

Tabel 8

Rincian Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember Tahun Anggaran 2025 /31 Desember Tahun Anggaran 2024

Uraian	31 Desember TA 2025	31 Desember 2024	Naik/ (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	0	0	0	#DIV/o!
Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	0	0	#DIV/o!
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	0	0	#DIV/o!
Belanja Tunj. Anak PNS	0	0	0	#DIV/o!
Belanja Tunj. Struktural PNS	0	0	0	#DIV/o!
Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	0	0	0,00%
Belanja Tunj. PPh PNS	0	0	0	#DIV/o!
Belanja Tunj. Beras PNS	0	0	0	#DIV/o!
Belanja Uang Makan PNS	0	0	0	#DIV/o!
Belanja Tunj. Lain-lain PNS	0	0	0	0,00%
Belanja Tunj. Umum PNS	0	0	0	#DIV/o!
Belanja Uang Lembur	0	0	0	#DIV/o!
Jumlah Belanja Pegawai Bruto	0	0	0	#DIV/o!
Pengembalian Belanja	0	0	0	#DIV/o!
Jumlah Belanja Pegawai Netto	0	0	0	#DIV/o!

Penyebab penurunan belanja pegawai dimaksud adalah karena beberapa hal sebagai berikut:

- ✚ **Penurunan Belanja Pegawai secara umum disebabkan karena belanja pegawai diambil alih oleh Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota**

B.2.2. Belanja Barang

Belanja Barang
Rp.687.097.907,00

Realisasi Belanja Barang pada 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.687.097.907,00** atau sebesar 99.26% persen dari pagu anggaran sebesar Rp.693.007.000,00 Apabila dibandingkan antara 31 Desember Tahun Anggaran 2025 dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja barang mengalami **kenaikan** sebesar Rp.1.952.067,00 atau sebesar **0,29%** persen.

Rincian realisasi Belanja Barang adalah seperti pada tabel 9 berikut:

Tabel 9
Rincian Realisasi Belanja Barang 31 Desember Tahun Anggaran 2025/31 Desember Tahun Anggaran 2024

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	% Naik/(Turun)
Belanja keperluan perkantoran	79.504.090	93.976.000	-15,40%
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	10.900.000	14.000.000	-22,14%
Belanja Barang Operasional lainnya	28.330.000	58.260.000	-51,37%
Belanja Barang Non Operasional - penanganan Pandemi COVID_19	0	0	#DIV/o!
Belanja bahan	118.285.605	104.666.875	13,01%
Belanja Honor Output kegiatan	0	0	#DIV/o!
Belanja Barang Non Operasional lainnya	0	0	#DIV/o!
Belanja Jasa	10.281.350	6.693.200	53,61%
Belanja Pemeliharaan	86.505.000	77.872.000	11,09%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	0	8.850.000	-100,00%
Belanja barang persediaan Barang Komsumsi	10.240.000	7.642.500	33,99%
Jumlah Belanja Barang Bruto	344.046.045	371.960.575	-7,50%
<i>Pengembalian Belanja</i>	0	0	0,00%
Jumlah Belanja Barang Netto	344.046.045	371.960.575	-7,50%

Penyebab kenaikan belanja barang dimaksud adalah karena beberapa hal sebagai berikut :

- ✦ Secara umum kenaikan realisasi belanja barang karena terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp. 1.952.067,- dari anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 693.007.000,- menjadi Rp. 676.287.000,-
- ✦ Kenaikan belanja barang operasional tahun anggaran 2025 disebabkan meningkatnya keperluan ujian-ujian Madrasah dan biaya kegiatan madrasah seperti UKS, PMR, Pramuka, PIK Remaja dll serta penyelenggaraan workshop Lokakarya;
- ✦ Pencairan dana pemeliharaan gedung dan bangunan yang realisasinya dipercepat;
- ✦ Penurunan belanja perjalanan dalam negeri disebabkan karena di blokirnya belanja perjalanan dinas

Belanja Modal
Rp.103.690.000

5.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.103.690.000,00** atau sebesar 100% persen dari pagu anggaran sebesar **Rp. 103.690.000,00** Apabila dibandingkan antara Tahun Anggaran 2025 dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja modal mengalami **penurunan** sebesar Rp.5.560.000000 atau sebesar 5,09 persen.

Rincian realisasi Belanja Modal adalah seperti pada tabel 10 berikut :

Tabel 10
Rincian Realisasi Belanja Modal 31 Desember Tahun Anggaran 2025 /31 Desember 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024	% Naik/(Turun)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.250.000	83.250.000	-15,62%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/o!
Belanja Modal Jalan & Jembatan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	
Belanja Modal lainnya	33.440.000	26.000.000	
Belanja Modal Fisik Lainnya	5	0	#VALUE!
Jumlah Belanja Modal Bruto	103.690.000	109.250.000	-5,09%
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Jumlah Belanja Modal Netto	103.690.000	109.250.000	-5,09%

Penyebab penurunan belanja modal dimaksud dikarenakan tahun 2025 ini MTsN 5 Lima Puluh Kota mendapat belanja modal peralatan dan mesin Rp.70.250.000 dan belanja modal lainnya 33.440.000 lebih kecil dibanding tahun 2024 belanja modal peralatan dan mesin Rp.83.250.000 dan belanja modal lainnya 26.000.000,-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp.0

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca)

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp.0,00,-**. Apabila dibandingkan dengan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0,00,-, maka Kas di Bendahara Pengeluaran mengalami tetap.

Tabel 11
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025/31 Desember 2024

No	Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	BPG 011 MTSN 5 KAB LIMA PULUH KOTA	0	0
2	Tunai	-	0
Jumlah		0	0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp.0,00

Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.

Beberapa kemungkinan adanya kas pada Bendahara Pengeluaran dapat terjadi karena :

- a. Adanya pendapatan yang telah diterima sebelum tanggal neraca namun sampai dengan tanggal neraca belum disetorkan ke kas negara, meliputi :
 - 1) Bunga dan Jasa Giro Rekening Bendahara yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca yang belum menerapkan Treasury Notional Pooling (TNP).
 - 2) Pungutan pajak yang belum disetor ke kas umum negara pada tanggal neraca.
 - 3) Pendapatan hibah langsung berupa uang yang ditampung pada rekening Bendahara Pengeluaran.
 - 4) Pengembalian belanja yang belum disetor ke kas Negara.Terhadap akun tersebut diinputkan dengan akun kredit Pendapatan yang Ditangguhkan.
- b. Adanya kewajiban satker kepada pihak lain, yaitu: Jika ada dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran seperti uang honor atau SPPD yang belum dibagikan kepada pihak lain.
Terhadap akun tersebut diinputkan dengan akun kredit Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191).

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar **Rp.0,00** dan per 31 Desember 2024 sebesar **0,00,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2025

No.	Keterangan	Jumlah
1	utang pajak bendahara pengeluaran yang belum disetor	Rp -
Jumlah		Rp -

C.1.4. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Belanja Dbyr Dimuka
Rp.0,00

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar **Rp.0,00** dan 31 Desember 2024 sebesar **Rp.0,00**. Rincian Belanja Dibayar Dimuka adalah sbb:

Tabel 14
Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai Dibayar Dimuka	Rp
2	Belanja Barang Dibayar Dimuka	Rp
3	Belanja Modal Dibayar Dimuka	Rp
Jumlah		

Belanja Dibayar Dimuka pada tabel dengan penjelasan sbb:

a) Belanja Pegawai yang Dibayar di Muka sebesar Rp.0,00

Belanja Pegawai yang Dibayar di Muka merupakan akun untuk merepresentasikan saldo persekot yang belum dilunasi oleh pegawai sampai dengan tanggal pelaporan. (Daftar Mutasi Persekot Gaji terlampir)

[Persekot merupakan pinjaman uang tidak berbunga yang diberikan kepada pegawai yang dipindahkan/dimutasi untuk kepentingan dinas. Persekot diberikan dengan maksud untuk membantu kebutuhan PNS beserta keluarganya di tempat tugas yang baru karena gaji bulan berikutnya belum tentu dapat dibayarkan tepat waktu karena belum sempat masuk ke dalam daftar gaji induk bulanan pada bulan berkenaan].

b) Belanja Barang yang Dibayar di Muka sebesar Rp.0,00

Belanja Barang yang Dibayar di Muka merupakan pengeluaran satuan kerja yang telah dibayarkan dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja.

C.1.5. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak
Rp.0,00

Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir periode pelaporan dan diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun (tidak termasuk penerimaan perpajakan).

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00 dan 30 Juni 2024 sebesar Rp.0,00.

Tabel 15
Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025

No.	Debitur	Jumlah
1	-	Rp -
2	-	Rp -
Jumlah		Rp -

Sedangkan mutasi piutang pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 16
Mutasi Piutang Bukan Pajak Tahun Anggaran 2025

Transaksi	Sub Jumlah	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2025		0
Mutasi Tambah:		
- Piutang Sewa Rumah Dinas	0	
- Penertiban SP2D dlm rangka TSA	0	0
Mutasi Kurang:		
- Piutang Uang Makan	0	0
Saldo per 31 Desember 2025		0

C.1.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang
Bukan Pajak Rp.0,,00

Penyajian akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 Tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember2025 sebesar **Rp.0,00** dan per 31 Desember2024 sebesar **Rp.0,00** yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Berikut disajikan perhitungan penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek untuk masing-masing debitor:

Tabel 17
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek
Per 31 Desember 2025

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
-	-	-	0.00%	-
-	-	-	0.00%	-
Jumlah				-

C.1.7. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

BL TPA Rp,00

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 30 Juni2023 masing-masing adalah sebesar Rp,00 dan Rp.0.00. Bagian Lancar TPA adalah merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca berupa angsuran atas penjualan rumah negara.

C.1.8. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih – Bag.
Lancar TPA Rp.0,0

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 30 Juni2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,00** dan **Rp.0,00** yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing tagihan.

C.1.11 Persediaan

Persediaan
Rp.964.500,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat.

Nilai persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp.964.500,-** dan per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 2.620.750,-**

Rincian persediaan per 31 Desember 2025/31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel 12 berikut :

Tabel 24
Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025/31 Desember 2024

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Barang Konsumsi	964.500	2.620.750
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-
3	Suku Cadang	-	-
4	Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan kpd Msyrkt	-	-
5	Bahan Baku	-	-
6	Persediaan Lainnya	-	-
	Jumlah	964.500	2.620.750

Mutasi Persediaan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Mutasi Persediaan Tahun Anggaran 2025

Transaksi	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2025	964.500
Mutasi Tambah:	
- Pembelian	0
- Hasil Opname Fisik Tambah	0
Mutasi Kurang:	
- Habis Pakai	0
- Hasil Opname Fisik Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2025	964.500

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Nilai persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname fisik sesuai BA Opname Fisik Nomor : 002 Mts.03.06.5/KU.00/12/2025. Tanggal 31 Desember 2025 (terlampir).

C.2. Aset Tetap

Nilai Buku Aset Tetap
Rp.2.779.732.063,00

Nilai perolehan aset tetap per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp.2.854.380.955,00** dan **Rp. 2.869.139.849,00,-** yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Sedangkan nilai akumulasi penyusutan aset tetap tersebut masing-masing sebesar (**Rp.1.331.110.763,-**) dan (**Rp. 1.233.661.869,-**)

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025/31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

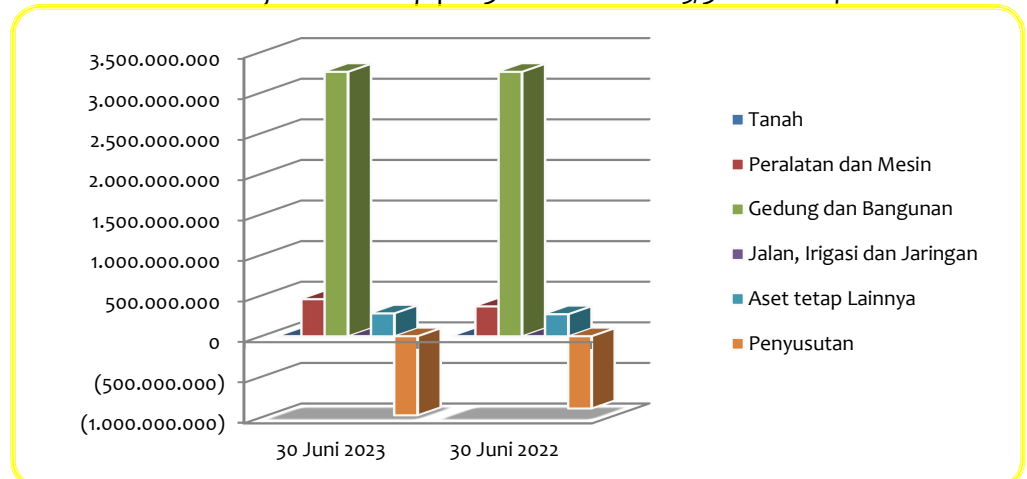
Tabel 26

Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2025/31 Desember 2024

No.	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	596.220.100	539.470.100
3	Gedung dan Bangunan	3.255.988.000	3.255.988.000
4	Aset tetap Lainnya	333.283.618	307.343.618
5	Akumulasi Penyusutan	-1.331.110.763	-1.233.661.869
6	Konstruksi Dlm Pengerjaan	0	0
Nilai		2.854.380.955	2.869.139.849
Akumulasi Penyusutan Aset tetap			
Nilai Bersih		2.854.380.955	2.869.139.849

Perbandingan nilai aset tetap per 31 Desember 2025/31 Desember 2024 dapat disajikan pada grafik berikut :

Grafik Aset Tetap per 31 Desember 2025/30 Juni 2024



Rekonsiliasi aset tetap per 31 Desember 2025 pada neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK BMN adalah sebagai berikut:

Tabel 27

Rekonsiliasi Aset Tetap pada Neraca dengan SIMAK BMN per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Aset Tetap dalam Neraca	Aset Tetap dalam SIMAK BMN	Selisih
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	596.220.100	596.220.100	0
3	Gedung dan Bangunan	3.255.988.000	3.255.988.000	0
4	Aset tetap Lainnya	333.283.618	333.283.618	0
5	Akumulasi Penyusutan	-1.331.110.763	-1.331.110.763	0
6	Konstruksi Dlm Pengerjaan	0	0	0
Jumlah		2.854.380.955	2.854.380.955	0,00

C.2.1. Tanah

Tanah Rp.0,00

Nilai perolehan aset tetap berupa tanah yang dimiliki MTsN 5 Lima Puluh Kota per 31 Desember 2025 sebesar **Rp.0,00** dan per 31 Desember 2024 sebesar **Rp.0,00**

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 28
Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2025

No	KIB	Luas	Nilai	Keterangan
1	1	479 m2	0	Lokal Jauh
2	2	5300 m2	0	Lokal dan Pekarangan
3	1	125 m2	0	Gedung Kantor
Jumlah			0	

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Buku Peralatan
dan Mesin
Rp.609.720.100,00,-

Posisi nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp.609.720.100,00** dan **Rp. 539.470.100,00** sedangkan nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin masing-masing sebesar Rp.(376.419.743) dan Rp.(239.137.600)

Sehingga nilai buku peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp. 609.720.100,00** dan **Rp. .539.470.100,00**

Mutasi/perubahan peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 29
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025

Mutasi Tambah :	
Pembelian	Rp 70.250.000
Transfer Masuk	Rp -
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp -
Jumlah Mutasi Tambah	Rp 70.250.000
Mutasi Kurang :	
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp -
Jumlah Mutasi Kurang	Rp -
Total Mutasi	Rp 70.250.000

Sedangkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025

Akun	Uraian	Jumlah
532111	BM Peralatan dan Mesin	Rp 70.250.000
532121	BM Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	Rp -
	Total	Rp 70.250.000

Penambahan Peralatan dan Mesin sudah sama dengan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin dari pembelian yaitu sebesar Rp.70.250.000,-

Transaksi penambahan peralatan dan mesin sebagaimana berikut:

1. Transaksi Pembelian terdiri dari :

No	Nama Barang	Unit	Rupiah
1	pengadaan Infocus	1	Rp 7.500.000
2	Pengadaan AC	1	Rp 7.000.000
3	Pengadaan Lemari Arsip	1	Rp 6.000.000
4	Pengadaan Tenda pramuka	1	Rp 6.000.000
5	Pengadaan Laptop	1	Rp 12.500.000
6	Pengadaan Kursi Kerja	1	Rp 3.000.000
7	Pengadaan TV Digital	1	Rp 12.100.000
8	Pengadaan Tab	1	Rp 12.150.000
9	Pengadaan Kursi Tamu	1	Rp 4.000.000
JUMLAH			Rp 70.250.000

2. Transaksi Transfer Masuk terdiri dari :

No	Nama Barang	Unit	Rupiah
1	pengadaan Infocus	1	Rp 7.500.000
2	Pengadaan AC	1	Rp 7.000.000
3	Pengadaan Lemari Arsip	1	Rp 6.000.000
4	Pengadaan Tenda pramuka	1	Rp 6.000.000
5	Pengadaan Laptop	1	Rp 12.500.000
6	Pengadaan Kursi Kerja	1	Rp 3.000.000
7	Pengadaan TV Digital	1	Rp 12.100.000
8	Pengadaan Tab	1	Rp 12.150.000
9	Pengadaan Kursi Tamu	1	Rp 4.000.000
JUMLAH			Rp 70.250.000

3. Koreksi Pencatatan Nilai/Kualitas terdiri dari:

No	Nama Barang	Unit	Rupiah
1	pengadaan Infocus	1	Rp -
2	Pengadaan AC	1	Rp -
3	Pengadaan Lemari Arsip	1	Rp -
4	Pengadaan Tenda pramuka	1	Rp -
5	Pengadaan Laptop	1	Rp -
6	Pengadaan Kursi Kerja	1	Rp -
7	Pengadaan TV Digital	1	Rp -
8	Pengadaan Tab	1	Rp -
9	Pengadaan Kursi Tamu	1	Rp -
JUMLAH			Rp -

transaksi penambahan peralatan dan mesin karena penambahan pembelian peralatan dan mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Buku Gedung
dan Bangunan
Rp.3.255.988.000,-

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp.3.255.988.000,00** dan **Rp.3.255.988.000,00** sedangkan nilai akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan masing-masing sebesar Rp(846.842.126,00)

Sehingga nilai buku Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp. 3.255.988.000,00** dan **Rp. 3.255.988.000,00**

Mutasi/perubahan gedung dan bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 31

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025

Mutasi Tambah :	
Pengembangan Nilai Aset	Rp -
Pengembangan melalui KDP	Rp -
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	Rp -
Jumlah Mutasi Tambah	Rp -
Mutasi Kurang :	
Penghapusan	Rp -
Reklasifikasi keluar	Rp -
Jumlah Mutasi Kurang	Rp -
Total Mutasi	Rp -

Sedangkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025

MA	Uraian	Jumlah
533111	BM Gedung dan Bangunan	Rp -
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp -
	Jumlah Belanja	Rp -

Penambahan nilai gedung dan bangunan sudah sama dengan realisasi belanja modal gedung dan bangunan yaitu sebesar Rp.0,00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Buku Jalan,
Irigasi dan Jaringan
Rp.0,00

Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 sedangkan nilai akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0,00

Sehingga nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

Mutasi/perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2025

Mutasi Tambah :	
Pembelian	Rp -
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp -
Jumlah Mutasi Tambah	Rp -
Mutasi Kurang :	
	Rp -
	Rp -
Jumlah Mutasi Kurang	Rp -
Total Mutasi	Rp -

Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sbb:

Tabel 34
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2025

MA	Uraian	Jumlah
534111	BM Jalan dan Jembatan	Rp -
534121	BM Irigasi	Rp -
534131	BM Jaringan	Rp -
534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi	Rp -
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	Rp -
	Jumlah Belanja	Rp -

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Buku Aset Tetap
Lainnya
Rp.340.783.618,,00,-

Nilai perolehan Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2025 dan 30 Juni 2013 masing-masing sebesar Rp.340.783.618,00 dan Rp. 307.343.618,00 sedangkan nilai akumulasi penyusutan aset tetap lainnya masing-masing sebesar Rp.33.440.000,00 dan Rp. 25.940.000,00

Sehingga nilai buku aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp. 340.783.618,00** dan **Rp. 307.343.618,00**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 35
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025

Mutasi Tambah :	
Pembelian	Rp 33.440.000
Jumlah Mutasi Tambah	Rp 33.440.000
Mutasi Kurang :	
Koreksi Nilai	Rp -
Jumlah Mutasi Kurang	Rp -
Total Mutasi :	Rp 33.440.000

Sedangkan realisasi Belanja Modal Fisik Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Realisasi Belanja Modal Fisik Lainnya Tahun Anggaran 2025

536111	BM Fisik Lainnya	Rp 33.440.000
--------	------------------	---------------

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP Rp.0,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025/ 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp.0,00** dan **Rp.0,00**

Nilai Konstruksi dalam pengerjaan mencakup nilai aset tetap yang masih dalam proses pembangunan, yang sampai dengan tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp.0,00

Jumlah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025/ 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp.0,00** dan **Rp.0,00** merupakan tagihan atas penjualan BMN yang pembayarannya melalui angsuran yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan.

Adapun rincian atas saldo TPA per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Per 31 Desember 2025

No.	Debitur	Jumlah
		0
		0
	Jumlah	0

Sedangkan mutasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) adalah sebagai berikut:

Tabel 38
Rincian Mutasi Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Tahun Anggaran 2025

Transaksi	Sub Jumlah	Jumlah
Saldo 31 Desember 2023		0
Mutasi Tambah:		
	0	0
Mutasi Kurang:		
- Reklasifikasi menjadi BL TPA	0	
- Pelunasan TPA Tahun 2024	0	0
Saldo per 30 Juni 2024		0

C.3.2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan TPA
Rp.0,00

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,00** dan **Rp.0,00** yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing tagihan. Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) untuk masing-masing debitur:

Tabel 39
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih –
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Per 31 Desember 2025

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
				-
				-
				-
Total				-

C.3.3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

TP/TGR Rp0,00

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar **Rp.0,00** dan **Rp.0,00**. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Tabel 40
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Per 31 Desember 2025

No.	Debitur	Jumlah
		0
	Jumlah	0

Sedangkan mutasi (TP/TGR) pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 41
Rincian Mutasi Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Tahun Anggaran 2024

Transaksi	Sub Jumlah	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2024		0
Mutasi Tambah:		
	0	0
Mutasi Kurang:		
- Reklasifikasi menjadi BL TP/TGR	0	
- Pelunasan TPA Tahun 2024	0	0
Saldo per 30 Juni 2024		0

C.3.4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan TP/TGR
Rp.0,00

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,00** dan **Rp.0,00** yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR. Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur:

Tabel 42
Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per 31 Desember 2025

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
				-
				-
				-
Total				-

C.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp.3.811.900,00

Nilai aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp.3.811.900,00** dan **Rp.3.811.900,00** yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025/31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 43
Aset Lainnya Per 31 Desember 2025/31 Desember 2024

Kelompok Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan / (penurunan)
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	3.811.900	3.811.900	0
Jumlah	3.811.900	3.811.900	0

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp.0,00

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025/31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp.0,00** dan **Rp.0,00**.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik berupa software komputer, lisensi dll.

C.4.2 Aset Lain-lain

Nilai Buku Aset Lain-lain
Rp3.811.900,00

Terdiri dari barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional MTsN 5 Lima Puluh Kota serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp.3.811.900,00** dan **Rp.3.911.900,00** sedangkan nilai akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan masing-masing sebesar Rp(0,00) dan Rp.0,00

Sehingga nilai buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp.3.811.900,00** dan **Rp.3.811.900,00**
Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 44
Rincian Mutasi Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2025

Transaksi	Sub Jumlah	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2022		0
Mutasi Tambah:		
- Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	0	0
Mutasi Kurang:		
- Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	0	0
- Penghapusan BMN	0	0
Saldo per 31 Desember 2022		0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban
Rp.0,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp.0,00**

C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak
Ketiga Rp.0,00

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025/31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp.0,00** dan **0,00** yang merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 45
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	
2	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	0	
3	Belanja Barang yang masih harus dibayar	0	
Jumlah		0	

Pendapatan Diterima
di Muka Rp.0,00

C.5.2. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka pada pos ini merupakan pendapatan yang diterima oleh satuan kerja dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja.

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025/31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp.0,00** dan **Rp.0,00**

Uang Muka dari
KPPN Rp.0,00

C.5.3. Uang Muka dari KPPN

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025/31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp.0,00** dan **Rp.0,00** merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Akun ini merupakan penyeimbang Akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

C.5.4. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan Yang
Ditangguhkan
Rp.0,00

Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2025.

Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2025/31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp.0,00** dan **Rp.0,00**.

Ekuitas Dana Lancar
Rp.0,00

C.6. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih

antara nilai aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
 Nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp.0,00**
 dengan rincian sebagai berikut:

Cadangan Piutang
 Rp.0,00

C.6.1. Cadangan Piutang

Merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2025/30 Juni2023 masing-masing sebesar **Rp.0,00** dan **Rp.0,00**

Cadangan Piutang tersebut merupakan penyeimbang akun-akun sebagai berikut:

Tabel 46
 Rincian Cadangan Piutang Per 31 Desember2025

No	CADANGAN PIUTANG	Jumlah
1	Piutang Bukan Pajak NETTO	0
2	Bagian Lancar Tagihan TGR NETTO	0
3	Belanja Pegawai Dibayar di Muka	0
JUMLAH		0

C.6.2. Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan
 Rp.0,00

Cadangan Persediaan merupakan penyeimbang Akun Persediaan. Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2025/30 Juni2024 masing-masing sebesar **Rp.0,00** dan **Rp.0,00**

C.6.3. Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Merupakan bagian dari ekuitas dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek per 31 Desember 2025/31 Desember 2024masing-masing sebesar **Rp.0,00** dan **Rp.0,00**

Akun ini merupakan penyeimbang pos Utang Kepada Pihak Ketiga, khusus untuk akun belanja yang masih harus dibayar, yang terdiri dari **belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp.0,00 dan belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp.0,00**

C.6.4. Barang/Jasa yang Harus Diterima

Barang/Jasa yang
 Harus Diterima
 Rp.0,00

Nilai Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2025/30 Juni2023 masing-masing sebesar **Rp.0,00** dan **Rp.0,00** Akun Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang akan diterima dari pihak lain.

Akun ini merupakan penyeimbang akun Belanja Dibayar Dimuka di Muka

Barang/Jasa yang
 Harus Diserahkan
 Rp.0,00

C.6.5. Barang/Jasa yang Harus Diserahkan

Nilai Barang/Jasa yang Harus Diserahkan per 31 Desember 2025/31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp.0,00** dan **Rp.0,00** merupakan Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Akun ini merupakan penyeimbang akun Pendapatan Sewa Diterima di Muka.

Ekuitas Dana
Investasi Rp 0,00

C.7. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi terdiri dari Diinvestasikan dalam Aset Tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Lainnya.

Diinvestasikan Dalam
Aset Tetap Rp.0-

C.7.1. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap. Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2025/31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**

Diinvestasikan Dalam
Aset Lainnya Rp0,0

C.7.2. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya. Nilai Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2025/31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp.0,00** dan **Rp.0,00**

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting lainnya setelah tanggal neraca.

D.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

D.3. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran.

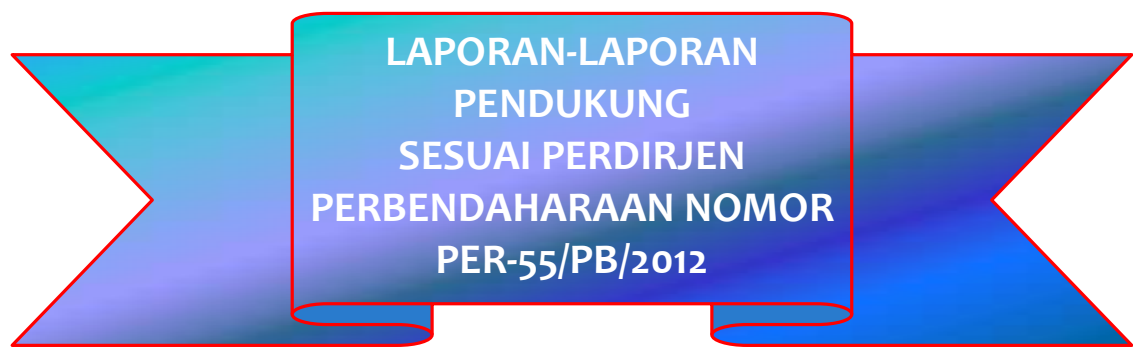
D.4. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional MTsN 5 Lima Puluh Kota PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk cabang Jakarta Cut Mutiah dengan nomor Virtual Account 652735529331000 a.n. BPG 011 MTSN 5 KAB LIMA PULUH KOTA

D.5. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

MTsN 5 Lima Puluh Kota yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman kenagarian Situjuh Batua kecamatan Situjuh Limo nagari Kab Lima Puluh Kota dalam penyusunan laporan keuangan periode semester II Tahun Anggaran 2025 termasuk penyusunan BMN baik yang disebabkan masalah intern dan ekstern adalah kekurangan tenaga

profesional dalam penyusunan laporan keuangan karena kurang memahami masalah keuangan yang dihadapi.

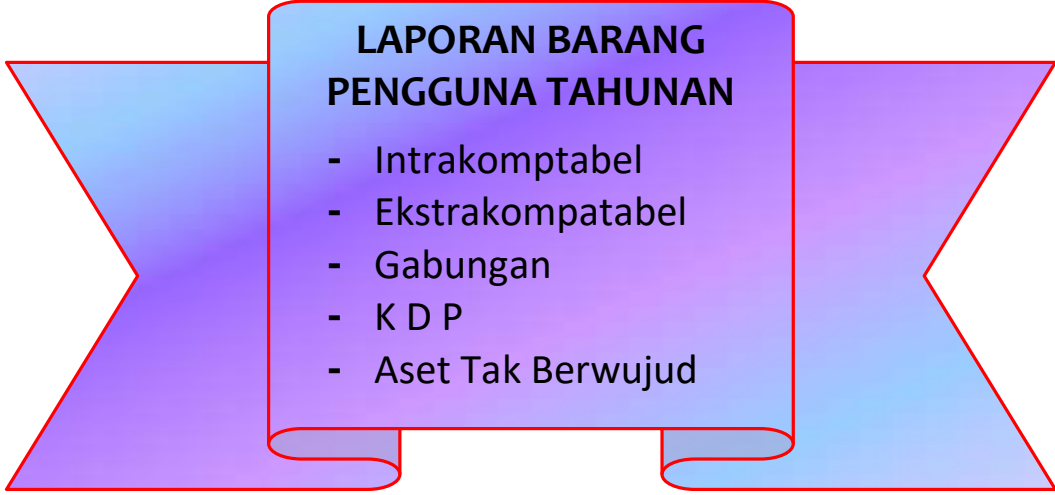


**LRA PENDAPATAN NEGARA
DAN HIBAH
&
LRA PENGEMBALIAN
PENDAPATAN NEGARA DAN
HIBAH**

**LRA BELANJA
&
LRA PENGEMBALIAN
BELANJA**

NERACA PERCOBAAN

LAPORAN BARANG
PENGGUNA



LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN

- Intrakomptabel
- Ekstrakompatabel
- Gabungan
- K D P
- Aset Tak Berwujud

**LAPORAN BARANG
PERSEDIAAN dan BA STOCK
OPNAME FISIK**

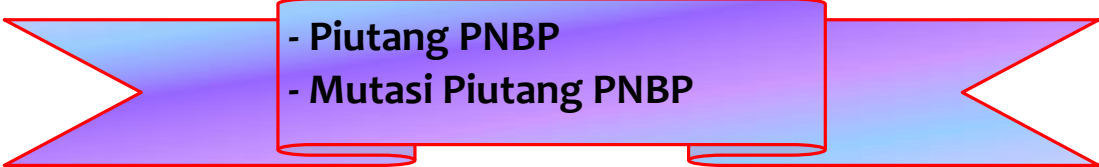
**BERITA ACARA
REKONSILIASI KPKNL**



**Informasi Pendapatan dan
Belanja secara Akrua**

**LPJ Bendahara & Rekening
Koran**

**DAFTAR MUTASI
PERSEKOT GAJI**

- 
- Piutang PNB
 - Mutasi Piutang PNB

**BERITA ACARA
REKONSILIASI KPPN/**

**BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL
SAKPA - SIMAK**

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (552933) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 LIMA PULUH KOTA

Tgl Data : 25/02/26 7:53 AM
Tgl Cetak : 25/02/26 11:17 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	14,651,250	25,783,500	(11,132,250)	(43.176)
Beban Barang dan Jasa	569,392,907	547,087,385	22,305,522	4.077
Beban Pemeliharaan	98,940,000	86,355,253	12,584,747	14.573
Beban Perjalanan Dinas	5,770,000	22,806,429	(17,036,429)	(74.7)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (552933) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 LIMA PULUH KOTA

Tgl Data : 25/02/26 7:53 AM
Tgl Cetak : 25/02/26 11:17 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	188,172,284	177,181,788	10,990,496	6.203
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	876,926,441	859,214,355	17,712,086	2.061
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(876,926,441)	(859,214,355)	(17,712,086)	2.061
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(876,926,441)	(859,214,355)	(17,712,086)	2.061
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(876,926,441)	(859,214,355)	(17,712,086)	2.061

Keterangan :

FINAL

LIMA PULUH KOTA, 25 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text "KEMENTERIAN AGAMA" at the top and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

SILVIA MARLINA

197307272005012003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (552933) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 LIMA PULUH KOTA

Tgl Data : 24/02/26 6:42 PM
Tgl Cetak : 25/02/26 11:17 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	2,871,957,597	2,945,882,885	(73,925,288)	(2.51)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(876,926,441)	(859,214,355)	(17,712,086)	2.06
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(4,987,500)	0	(4,987,500)	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(4,987,500)	0	(4,987,500)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	790,787,907	785,289,067	5,498,840	0.7
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(91,126,034)	(73,925,288)	(17,200,746)	23.27
EKUITAS AKHIR	2,780,831,563	2,871,957,597	(91,126,034)	(3.17)

Keterangan :
FINAL

LIMA PULUH KOTA, 25 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



SILVIA MARLINA
197307272005012003

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025
ESELON I : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM 04
SATUAN KERJA : MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 LIMA PULUH KOTA 552933

Tgl Data : 25/02/26 7:53 AM
Tgl Cetak : 25/02/26 11:18 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	796,697,000	790,787,907	(5,909,093)	99.26	785,537,000	785,289,067	(247,933)	99.97
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	693,007,000	687,097,907	(5,909,093)	99.15	676,287,000	676,039,067	(247,933)	99.96
3. Belanja Modal	103,690,000	103,690,000	0	100.0	109,250,000	109,250,000	0	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025
ESELON I : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM 04
SATUAN KERJA : MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 LIMA PULUH KOTA 552933

Tgl Data : 25/02/26 7:53 AM
Tgl Cetak : 25/02/26 11:18 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	796,697,000	790,787,907	(5,909,093)	99.26	785,537,000	785,289,067	(247,933)	99.97
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

LIMA PULUH KOTA, 25 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



SILVIA MARLINA
197307272005012003

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (552933) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 LIMA PULUH KOTA

Tgl Data : 25/02/26 7:53 AM

Tgl Cetak : 25/02/26 11:18 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	964,500	2,620,750	(1,656,250)	(63.20)
JUMLAH ASET LANCAR	964,500	2,620,750	(1,656,250)	(63.20)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	609,720,100	539,470,100	70,250,000	13.02
Gedung dan Bangunan	3,255,988,000	3,255,988,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	340,778,618	307,343,618	33,435,000	10.88
AKUMULASI PENYUSUTAN	(1,426,759,655)	(1,233,661,869)	(193,097,786)	15.65
JUMLAH ASET TETAP	2,779,727,063	2,869,139,849	(89,412,786)	(3.12)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	3,816,900	3,811,900	5,000	0.13
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(3,676,900)	(3,614,902)	(61,998)	1.72
JUMLAH ASET LAINNYA	140,000	196,998	(56,998)	(28.93)
JUMLAH ASET	2,780,831,563	2,871,957,597	(91,126,034)	(3.17)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	2,780,831,563	2,871,957,597	(91,126,034)	(3.17)
JUMLAH EKUITAS	2,780,831,563	2,871,957,597	(91,126,034)	(3.17)
JUMLAH EKUITAS	2,780,831,563	2,871,957,597	(91,126,034)	(3.17)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,780,831,563	2,871,957,597	(91,126,034)	(3.17)

Keterangan :

FINAL

LIMA PULUH KOTA, 25 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



SILVIA MARLINA

197307272005012003 197307272005012003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (552933) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 LIMA PULUH KOTA

Tgl Data : 25/02/26 7:53 AM

Tgl Cetak : 25/02/26 11:18 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	964,500	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	609,720,100	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,255,988,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	340,778,618	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	448,013,672
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	967,408,483
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	11,337,500
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,816,900	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	3,676,900
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	790,787,907
0.0	391111	Ekuitas	0	2,871,957,597
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4,987,500	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	135,761,050	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	26,160,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	141,098,345	0
3.0	521211	Beban Bahan	207,631,682	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	33,860,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	19,431,300	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	5,450,530	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	86,470,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12,470,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5,770,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	66,606,429	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	120,566,357	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	937,500	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	61,998	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	14,651,250	0
JUMLAH			5,093,182,059	5,093,182,059

Keterangan :

FINAL

LIMA PULUH KOTA, 25 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



SILVIA MARLINA

197307272005012003

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (552933) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 LIMA PULUH KOTA

Tgl Data : 24/02/26 6:42 PM

Tgl Cetak : 25/02/26 11:18 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	790,787,907
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	135,761,050	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	26,160,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	141,098,345	0
3.0	521211	Belanja Bahan	207,631,682	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	33,860,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12,995,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	19,431,300	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	5,450,530	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	86,470,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12,470,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,770,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70,250,000	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	33,440,000	0
JUMLAH			790,787,907	790,787,907

Keterangan :

FINAL

LIMA PULUH KOTA, 25 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



SILVIA MARLINA

197307272005012003